

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung ;
- Andi Hamzah, 2000, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta ;
- Bambang Poernomo, 1982, *“Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*, Liberty, Yogyakarta ;
- Bambang Sugono, 2007, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ;
- Bambang Waluyo, 2015 *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)”*, Sinar Grafika, Jakarta ;
- Departemen Kehakiman, 1982, *“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”*, Departemen Kehakiman, Jakarta ;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1991 *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta ;
- E.Sundari, 2015, *“Praktik class action di Indonesia”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta ;
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *“Pengantar Hukum Pidana”*, UMM Press, Malang ;

Henry P. Panggabean, 2001, *“Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA”*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta ;

H. Setiyono, 2005, *“Kejahatan Korporasi”*, Bayumedia Publishing, Malang ;

Johnny Ibrahim, 2007, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Bayu Media Publishing, Malang ;

Julia Brannen, 2002, *“Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ;

Leden Marpaung, 2009, *“Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan”*, Djambatan, Jakarta ;

Lilik Mulyadi, 2010, *“Hukum Acara Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung ;

Loebby Loqman, 1984 *“Pra-Peradilan di Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Jakarta ;

M. Husein Harun, 1991, *“Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana”*, PT. Rineka Cipta, Jakarta ;

Mien Rukmini, 2003, *“Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Alumni, Bandung ;

M. Lutfi Chakim, 2018, *“Konstitusi (Parpol Wajib Verifikasi)”*, Majalah Mahkamah Konstitusi, Jakarta ;

Muhammad Ahmadi dan Zaenal Arifin Fahmi, 2010, *“Metode Penelitian Hukum cet. ke- 1”*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Jakarta ;

Muladi dan Dwija Priyatno, 2010, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*,
Prenada Media, Jakarta ;

M. Yahya Harahap, 2000, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali)”*, Sinar Grafika, Jakarta ;

_____, 2008, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)”*, Sinar Grafika, Jakarta ;

Peter Mahmud, 2008, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta ;

P. Joko Subagio, 1991, *“Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik”*, Rineka
Cipta, Jakarta ;

Ratna Nurul Afiah, 1986, *“Praperadilan dan Ruang Lingkupnya”*, Akademika
Pressindo, Jakarta ;

Riki Yuniagara, 2013, *“Jenis Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia dalam Lintas Sejarah (Tap MPR dari Masa ke Masa)”*,
Wordpress, Banda Aceh.

R. Soeparmono, 2003, *“Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti
Kerugian dalam KUHAP”*, Mandar Maju, Bandung ;

Supriyadi Widodo, 2014, *“Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan
Praktiknnya”*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta ;

Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah Chaerudin, 2008, *“Strategi*

Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Korupsi”, Rifka Aditama,
Bandung ;

Tri Andrisman, 2005, *“Delik-Delik Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Universitas Lampung,
Lampung ;

Wirjono Projodikoro, 1974, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Sumur Bandung,
Bandung ;

Yanto, 2013, *“Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Kepel Press,
Yogyakarta ;

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *“Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”*, PT. Raja
Grafindo Persada, Yogyakarta ;

Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi ;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan

Kembali Putusan Praperadilan ;

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian

Penanganan Perkara ;

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 ;

Putusan Praperadilan Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Jurnal Ilmiah

Ananda Rizky, *“Kompetensi Hakim Praperadilan Dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 13 April 2016, hlm. 2 ;

Choirudin Rahmad Riyan, *“Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”*, Diponegoro Law Review Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Volume 5, 14 Maret 2016, Nomor 2, hlm. 2.

Website/Internet

“Alur KPK Kembali Tetapkan Setnov Jadi Tersangka Kasus E-KTP”,

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/18393861/alur-kpk-kembali->

[tetapkan-setnya-novanto-jadi-tersangka-kasus-e-kt](https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/18393861/alur-kpk-kembali-tetapkan-setnya-novanto-jadi-tersangka-kasus-e-kt), diakses pada
Jum’at 11 Mei 2018 ;

“Eksplisit”,

<https://kbbi.web.id/eksplisit>, diakses pada Jum’at, 11 Mei 2018 ;

“Hukum di Indonesia”,

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia, diakses pada Sabtu, 12 Januari 2018, pukul 13.45 WIB ;

“Indeks Persepsi Korupsi RI Turun”,

<https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun/3692750.html>, diakses pada Jum'at, 20 Oktober 2017, pukul 21.40 WIB ;

“Korupsi”,

www.kbbi.co.id, diakses pada Sabtu, 21 Oktober 2017, pukul 14.34 WIB.

“KPK Pastikan Jerat Setya Novanto dengan Alat Bukti Baru”,

<https://nasional.tempo.co/read/1041446/kpk-pastikan-jerat-setya-novanto-dengan-alat-bukti-baru>, diakses pada Sabtu, 5 Mei 2018 ;

“Perkuat Lembaga Praperadilan daripada Konsep Hakim Komisaris”,

<http://kampus.okezone.com/read/2010/18/95/333714/95/perkuat-lembaga-praperadilan-daripada-konsep-hakim-komisaris>, diakses pada Senin, 7 Mei 2018 ;

“Perma No. 4 Tahun 2016 dan Asas Pengadilan Tidak Boleh Menolak Perkara”,

https://www.kompasiana.com/advokat-faridmuadz/perma-no-4-tahun-2016-dan-asas-pengadilan-tidak-boleh-menolak-perkara_57328ba283afbd911b56bafb, diakses pada Rabu, 9 Mei 2018 ;

“Praperadilan VS Hakim Komisaris”,

<http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa->

[pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya](http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-) , diakses pada Senin, 7 Mei
2018.

